Zakat dan Penanganan Kemiskinan

Mujetaba Mustafa^{1*}, Ammar Munir², Ismail Kappaja²

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

* E-mail: mujetaba@yahoo.com

Abstract

The prophet's call to pay attention the factor that can recite the faith of a muslim is something that needs to be explored and recognized well, so that the forms of anticipation can be prepared. One such factor is poverty. In this paper, a review of the major influences gives freedom and influence to week and strengthen a person. By doing a descriptive analysis of the conception and implementation of Islamic doctrines such a zakat, with regard to social functions and economic development of their welfare, the authors discuss how zakat can be managed optimally and get government support to find solutions to help and reduce poverty. The maximization of zakat management is offered as one of the government's options in poverty alleviation, it's not only because zakat has the concept of distributing the distribution of the benefits and the value of the budget to assets, but also because zakat is a religious doctrine associated with anticipatory policies in response to influencing faith.

Keywords: Zakat; Poverty; Regulation

Abstrak

Seruan Nabi SAW untuk memperhatikan faktor yang dapat melemahkan keimanan seorang muslim, merupakan hal yang perlu didalami dan dikenali dengan baik, agar dapat dipersiapkan bentuk-bentuk antisipasinya. Salah satu faktor tersebut adalah kemiskinan. Dalam tulisan ini dikaji tentang seberapa besar pengaruh kemiskinan memberikan dampak dan pengaruh terhadap melemah dan menguatnya keimanan seseorang. Dengan melakukan analisa deskriptif terhadap konsepsi dan implementasi doktrin Islam seperti zakat, terutama berkenaan dengan fungsi sosial dan pengembangan ekonomi keumatannya, maka penulis memandang bahwa zakat jika pengelolaannya maksimal dan mendapatkan dukungan pemerintah seharusnya mampu memberi solusi bagi penanganan dan penanggulangan kemiskinan. Ditawarkannya maksimalisasi pengelolaan zakat sebagai salah satu opsi pemerintah dalam penaggulangan kemiskinan, bukan hanya karena zakat memiliki konsep distribusi pemerataan manfaat dan nilai kesejahteraan terhadap harta, tetapi juga karena zakat adalah doktrin agama yang menjadi semacam ajaran antisipatif dalam menyikapi dampak kemiskinan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keimanan.

Kata Kunci: Zakat; Kemiskinan; Regulasi

1. Pendahuluan

Persoalan yang cukup menguras perhatian pemerintah Indonesia dari rentang waktu 2014-2019 adalah masalah kemiskinan. Data statistik tentang angka kemiskinan adalah: Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen, menurun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 6,69 persen, turun menjadi 6,56 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 persen, turun menjadi 12,60 persen pada September 2019. Dibanding Maret 2019, jumlah penduduk miskin September 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 137 ribu orang (dari 9,99 juta orang pada Maret 2019 menjadi 9,86 juta orang pada September 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 221,8 ribu orang (dari 15,15 juta orang pada Maret 2019 menjadi 14,93 juta orang pada September 2019). Garis Kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar Rp. 440.538,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp324.911,- (73,75 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 115.627,- (26,25 persen). Pada September 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan.¹

Meski pun dari bacaan statistic tersebut, angka kemiskinan di Indonesia menurun, namun problematika kemiskinan bagi bangsa Indonesia hingga saat ini masih menjadi dilema karena Indonesia jika dilihat dari sumber daya alamnya adalah sebuah negara yang dikaruniai kekayaan alam yang terhampar di daratan dan lautnya sangat luar biasa.

Pembacaan angka kemiskinan yang didasarkan pada ketersediaan sandang, papan, dan pangan, sering kali melalaikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar lain bagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut pada sisi pendidikan, baik pendidikan intelektual, spiritual atau pun mental. Jadi kadang perhatian terhadap penanggulangan kemiskinan terjebak pada kebutuhan mendesak dan bersifat sesaat, lalu melupakan kebutuhan yang bersifat jangka panjang yang mempengaruhi masa depan generasi sebuah bangsa.

Apabila melihat dari pendekatan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan. Ketidakmampuan tersebut kemudian diukur menggunakan dua komposisi, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. BPS menilai bahwa beberapa penyebab tinggi atau rendahnya angka kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa hal berikut: Pertama, perubahan rata-rata upah buruh per hari. Kedua, nilai tukar petani (NTP). Ketiga, angka inflasi secara umum. Keempat, harga eceran tertinggi (HET) beberapa komoditas pokok, seperti harga beras, telur, ayam dan sebagainya. Kelima, rata-rata pengeluaran per kapita. Keenam, kuota penerima pelaksana program

---

¹"Presentase Penduduk Miskin September 2019 Turun Menjadi 9,22 Persen", *Situs Resmi Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>. (1 April 2019).

bantuan pangan non-tunai (BPNT).²

Banyak pengkaji sosial menilai bahwa kemiskinan sebenarnya bukanlah sesuatu fenomena kemasyarakatan yang terjadi secara mendadak atau hanya disebabkan oleh satu saja, seperti sikap malas penduduk untuk berusaha. Kemiskinan terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling terkait antara satu dengan yang lain.

Disadari bahwa akibat kurangnya ketersediaan sandang, papan, dan pangan akan berimbas pada ketidak mampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang tentu bisa sampai pada kondisi gizi buruk dan tidak tersedianya pemukiman yang layak huni, dan lain-lain. Akibat lain juga bisa muncul jika pendampingan mental spritual masyarakat tidak dilakukan, maka akan muncul angka kriminal dan penyakit sosial lain yang dipengaruhi oleh penanganan dan perhatian terhadap problematika kemiskinan yang tidak integratif.³

Penggiat zakat Indonesia Didin Hafidzuddin berpandangan bahwa problem kemiskinan jika tidak ditangani secara integrative bisa menyebabkan terjadinya proses perubahan budaya bangsa yang sangat signifikan dari bangsa yang berbudaya ramah, suka bergotong royong, dan saling toleransi menjadi bangsa yang hedonis, kasar, pemarah, dan kehilangan moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Problematika kemiskinan adalah masalah yang kompleks, sehingga pendekatan penanganannya juga harus integratif. Kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan pengaruhnya bersifat multiplier effect bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan secara luas.⁵ Ketegangan-ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat, baik dalam skala kecil, menengah atau besar, sepanjang krisis ekonomi, seperti saat tingginya harga kebutuhan pokok dan rendahnya daya beli masyarakat, tentu mempengaruhi ketahanan sosial masyarakat dan ketahanan nasional. Beberapa hasil kajian menunjukkan bahwa kemiskinan juga merupakan muara dari muncul dan merebaknya masalah sosial yang ada. Misalnya meningkatnya jumlah anak jalanan, perlakuan salah terhadap anak (child abuse), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menjamurnya rumah kumuh, premanisme, narkoba, pengangguran.

Beberapa pengkaji sosiologi Islam menilai bahwa kemiskinan yang tidak tertangani secara baik, bukan hanya berdampak distabilitas sosial, bahkan dapat menjadi penyakit yang membahayakan akidah atau keimanan umat beragama. Orang miskin yang hidup dilingkungan orang kaya yang tidak peduli dengannya, bisa jadi memiliki kecenderungan untuk 'menggugat' nilai ajaran agama yang diyakininya, karena merasa bahwa kemuliaan ajaran agamanya tidak berdampak positif apa pun bagi kehidupan mereka. Di sisi lain orang kaya dengan mudahnya mendemonstrasikan hidup berlebih dengan cara menumpuk kekayaan, keadaan seperti itu dapat memicu keraguan dan pertanyaan atas kebenaran dan kesucian agama yang diyakininya. Sikap ragu terhadap kebenaran ajaran agama, apalagi jika terjadi terus menerus, tentu dapat memperlemah sikap keberagamaan. Efek lain dari kemiskinan bukan hanya mengakibatkan pendangkalan akidah, melainkan juga dapat mengantarkan kepada kemurtadan.

---

²Rahma Anjaeni, "Enam Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Versi BPS", kontan.co.id. 06 Februari 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/enam--yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps>. (15 Maret 2020)

³Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). h. 2.

⁴Didin Hafidzuddin, "Tiang Utama Ekonomi Syari'ah", Makalah Dipresentasikan pada Seminar Bulanan MES, Bank Mandiri Tower, 20 November 2006.

⁵Muhammad Ja'far Hafsan, "Zakat sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah, Pengentasa Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat" (Bandung: Iris Prss, 2008). h. 9.

Kondisi hidup yang serba kekurangan, kebutuhan makan dan minum keluarga yang tak terpenuhi, ketiadaan tempat yang layak untuk hunian, dan akses pendidikan dan kesehatan yang tak tersedia, semuanya akan mudah melahirkan sikap jauh dari agama.

Untuk menguatkan keyakinan akan adanya perhatian ajaran Islam atas kesulitan hidup setiap muslim yang mengalami himpitan hidup dan kelemahan secara ekonomi, maka implementasi pengamalan ajaran zakat seharusnya menjadi semacam tawaran solutif bagi penanganan dan penanggulangan problematika kemiskinan bagi pemerintah Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.⁶ Selain itu, ajaran Islam juga memang merupakan ajaran yang sangat menekankan setiap pemeluknya untuk giat berusaha dan bekerja keras agar dapat memperoleh rizki yang halal untuk diri dan keluarganya sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus menengadahkan tangan meminta kepada orang lain. Dan apabila di suatu situasi masyarakat muslim masih membutuhkan bantuan materil dan keuangan untuk mencukupi kebutuhan pokok mereka, maka ajaran zakat harus diupayakan maksimalisasi pengelolaannya agar dapat menjadi solusi atas usaha penanggulangan kemiskinan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada kajian pustaka. Di mana data-data yang didapatkan dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan teori dan kejadian yang terjadi. Dengan melakukan analisa deskriptif terhadap konsepsi dan implementasi doktrin Islam seperti zakat, terutama berkenaan dengan fungsi sosial dan pengembangan ekonomi keumatannya

3. Hasil dan Analisis

2.1. Terminologi Sosial Kemiskinan

Terma kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷ tersusun dari akar kata miskin dengan imbuhan “ke” dan “an” yang memiliki persamaan dengan terma kefakiran yang tersusun dari kata fakir dengan imbuhan “ke” dan “an”. Kata “fakir dan miskin” mempunyai arti yang sama dalam konteks keterbatasan dan kekurangan dari segi materi, namun ada yang menilai keduanya berbeda. Kata fakir mempunyai dua pengertian. Pertama: yaitu orang yang sangat kekurangan; orang yang terlalu miskin. Kedua: orang yang sengaja membuat dirinya menderita dan berkekurangan untuk mencapai tingkatan kesempurnaan batin. Ada pun kata miskin juga mempunyai pengertian tidak berharta benda, serba kekurangan, dan berpenghasilan rendah.

Al-Raghib Al-Isfahani ketika menjelaskan makna fakir menyebutkan empat pengertian: 1) Fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. 2) Fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta minta. 3) Fakir dalam arti fakir jiwanya, ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang kepada kekafiran. 4) Fakir dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada pentunjuk dan bimbingan Tuhan,

---

⁶Fuad Zen, “Kontribusi Zakat bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Permasalahannya: Sebuah Tilikan Normatif dan Empirik” dalam *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara lain Idealitas dan Realitas* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008). h. 13.

⁷Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). h. 273 dan 660.

sehingga orang tersebut tidak merasa sombong⁸. Yusuf al Qardawi memandang miskin sebagai situasi orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

Term miskin diungkap dalam al Quran dengan dua ungkapan, yaitu al-sa'il dan al-mahrum dalam berbagai kitab tafsir didefinisikan dengan orang miskin yang meminta-minta (al-sa'il), dan kata al mahrum adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada.⁹

Parameter tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari standar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hidup, kurangnya kesempatan berusaha, hingga terkait ketiadaan akses pendidikan dan kesehatan. BKKBN memberikan pengertian kemiskinan dengan menggunakan indikator kualitatif, sebagai berikut: 1) makan kurang, dua kali per hari, 2) sebagian besar lantai dari tanah, 3) tidak mempunyai pakaian yang berbeda untuk beragam aktivitas, 4) makan daging/telur minimal sekali per minggu, 5) membeli baju baru minimal sekali per tahun dan 6) luas lantai rumah rata-rata kurang dari 8 m².¹⁰

Kemiskinan dalam diskursus agama Islam juga didefinisikan beragam. Salah satu yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah adanya beberapa term yang digunakan untuk menunjuk makna miskin, baik dalam al-Quran maupun dalam Hadis. Diantara dua term yang sering digunakan adalah kata fakir dan kata miskin. Secara umum kedua kata tersebut dimaknai sama yaitu orang yang sangat berkekurangan. Al-Qur'an menyebut orang yang sangat kekurangan dengan dua sebutan, al-sa'il dan al-mahrum. Al-sa'il dan al-mahrum adalah orang yang memiliki harta setengah dari kebutuhan hidupnya atau lebih tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau tanggungannya, melalui jalan meminta-minta ataupun tidak.

Kata fakir diungkap sebanyak 12 kali dan kata miskin sebanyak 25 kali di dalam al-Quran, 5 ayat masing-masing digunakan untuk pengertian yang bermacam-macam, sedang makna yang terkait dengan zakat terdapat dua kata yang menunjukkan arti zakat, yaitu kata zaka dan kata sadaqah. Zakat dari aspek bahasa berasal dari kata dasar (masdar) zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹¹ Kalau zaka itu menunjuk sesuatu, berarti berkembang, dan menunjuk seseorang itu zaka berarti orang itu baik.

Sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti lawan dari dusta atau pemberian. Karenanya sadaqah berarti apa yang diberikan karena Allah untuk orang-orang fakir dan miskin, dan kata al-mutasaddiq berarti orang yang memberikan sadaqah.¹² Penggunaan kata sadaqah yang berasal dari kata sadaqa dapat mengandung pengertian bahwa pemberian sadaqah itu terkait dengan kejujuran seseorang. Orang yang memberikan sadaqah adalah orang yang jujur, yang tidak berdusta dengan keimanannya sendiri. Karena itu sadaqah adalah bukti kebenaran iman sebagaimana

⁸Al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufrada Alfaz al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). h. 397-398.

⁹Lihat Yusuf Qardawi, *Hudari hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., cet. 11 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010). h. 512.

¹⁰Widjajanti Isdijoso dkk, *Kertas Kerja Semeru, Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*; (Jakarta: The SMERU Research Institut, 2016), h. 5.

¹¹Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Mu'jam al-Wasit* (Teheran; Makatabah al-Ilmiyah, t.t.), I: 398.

¹²Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, t.t.) X: 193.

halnya bakhil sebagai bukti kedustaan. Pengertian di atas sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Lail (92): 5-9: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. 5 Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga). 6. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 7. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. 8. serta mendustakan pahala terbaik. 9.”

Zakat dari aspek istilah fikih didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang beragam. Yusuf Qardawi mendefinisikan zakat dengan “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah disertahkan kepada orang-orang yang berhak.”¹³ Ulama Malikiyyah memeberikan pengertin zakat dengan “pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nishab untuk mustahiknya jika telah sempurna kepemilikan dan haul kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haul-nya”. Ulama Hanafiyyah mendefenisikan zakat dengan “menjadikan hak milik bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara’. Ulama Syafi’iyyah mendefinisikan zakat dengan “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu”. Ulama Hanabilah memberikan pengertian zakat dengan “hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu”.¹⁴

Berpijak pada beberapa pengertian para ulama di atas, maka sesungguhnya zakat merupakan pengeluaran sejumlah harta orang tertentu yang menjadi hak orang lain atau perpindahan kepemilikan terjadap harta zakat tersebut dari kelompok tertentu yang dalam hal ini adalah pemilik harta yang disebut muzakki kepada kelompok lain yang berhak atas harta tersebut yang disebut mustahiq.

Dalam al-Qur’an, kata zakat diungkap dalam bentuk ma’rifah sejumlah tiga puluh kali, dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetap tidak di dalam satu ayat, yaitu Q.S. al Mu’minun (23): 2 dan 4. Dari tiga puluh kali kata zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Mekkah dan selebihnya diturunkan di Madinah.¹⁵ Itu artinya, ayat-ayat zakat lebih banyak turun pada masyarakat Madinah yang kompleks dan heterogen, sehingga pengaruh praksisnya berdampak lebih luas secara sosial kemasyarakatan.

2.2. Analisa Kemiskinan Dan Penyebabnya

Ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya kemiskinan menurut beberapa pengamat social,¹⁶ antara lain disebabkan oleh kondisi pemerintah dan sistem ekonomi yang tidak efektif, tidak teratur, cenderung korup dan tidak mampu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat kecil. Soedjarmoko menilai faktor utama yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan, terutama di masyarakat perkotaan adalah ketidakadilan. ¹⁷ Peluang bagi rakyat kecil untuk memperbaiki taraf hidup mereka selalu terhambat oleh adanya kebijakan yang seringkali mengucilkan komunitas tersebut. Mereka tidak mendapat akses yang mudah dalam mendapatkan peluang berusaha dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Mereka seringkali hanya menjadi objek penyaluran bantuan yang bersifat konsumtif saja, sementara

¹³Yusuf Qardawi, *Fiqh al-zakah*, Cet. 2, (Beirut: Muassasat ar-Rsyar’I karena Allahisalah, 1973). h.34.

¹⁴Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), II: 730-731.

¹⁵Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, *Mu’jam al-Mufahras li al-faz al-Qur’an* (ttp.:tnp., t.t.) pada kata

“Zakat”

¹⁶Johm Kennet Galbraith, *Hakekat Kemiskinan Massa* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983). h. 11.

¹⁷Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 1983). h. 2.

perhatian untuk mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha sering terlupakan. Mereka dimarginalkan dan dikucilkan dari kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi produktif tersebut, akibatnya mereka akan tetap menjadi sasaran penyaluran bantuan-bantuan yang bersifat konsumtif karena kemiskinannya.¹⁸

Seorang peneliti dari Bangladesh menilai bahwa kaum miskin tidak menciptakan kemiskinan atas diri mereka, tetapi lembaga-lembaga yang dibangun serta kebijakan yang dibuat yang menciptakan kemiskinan atas mereka. Jika ingin mengatasi penyebab kemiskinan, maka harus mengubah sikap lembaga-lembaga tersebut dan mengambil kebijakan pembangunan yang berpihak kepada mereka.¹⁹ Ada juga yang menilai bahwa munculnya kemiskinan, terutama pada masyarakat perkotaan adalah karena membangun kerangka teoritis berdasarkan asumsi-asumsi yang merendahkan kapasitas manusia, dengan merancang konsep-konsep yang terlampaui kaku dengan tunduk pada mekanisme dan sistem perbankan seperti konsep bisnis, kelayakan kredit, kewirausahaan, lapangan kerja atau mempersulit peluang pengembangan lembaga-lembaga yang belum matang seperti lembaga-lembaga keuangan yang tidak mengikutsertakan kaum miskin.²⁰ Dapat dikatakan bahwa sebenarnya kemiskinan tersebut disebabkan oleh kegagalan pada tataran konseptual, dan bukan kurangnya kapabilitas komunitas atau masyarakat yang dianggap miskin.

Dalam diskursus sosiologi sering diungkapkan bahwa ada dua penyebab utama mengapa orang menjadi miskin, yaitu: kultural atau natural dan structural atau buatan.²¹ Kultural adalah kemiskinan yang dipicu oleh lemahnya etos kerja, sikap hidup yang sikap fatalis, yaitu kesalahan dalam memahami makna rizki, malas berusaha termasuk malas mengembangkan kemampuan diri serta terperangkap pada pola hidup orang miskin itu sendiri. structural, yakni kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat komunitas atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas secara merata. Dalam istilah lain, kemiskinan structural lahir dari adanya tatanan sosial yang individualistis, yang cenderung permissive kepada orang kaya untuk terus memperkaya diri tanpa mau eduli dan membantu untuk menumbuhkan potensi ekonomi masyarakat miskin.²²

2.3. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, adalah wajar jika salah satu referensi yang dapat diajukan untuk dasar pijakan usaha penanggulangan dan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah adalah nilai-nilai ajaran Islam. Nilai dan ajaran yang dimaksud adalah ajaran zakat. Konsepsi Islam sebagai rahmah mengandung makna bahwa ajaran zakat dalam Islam adalah ajaran yang memerintahkan untuk memberi perhatian kepada komunitas miskin yang ada pada suatu masyarakat yang harus mendapatkan kasih sayang (rahmah), salah satu caranya adalah dengan mengangkat kesulitan hidup mereka dengan mendorong upaya memaksimalkan pengelolaan zakat tersebut.

¹⁸M. Dawam Raharjo, *Esei-Esei Ekonom Politik* (Jakarta: LP3ES, 1983). h. 2.

¹⁹Lihat Wawancara dengan Mhammad Yunus dalam *Al-Washathiyah*, Vol. III, No14, 2008. h. 58

²⁰Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, terj. Irfan Maulana (http://tnp., 2007). h. 274.

²¹Soetrisno, *Memberdayakan Masyarakat Pedesaan* (Sidoarjo: Lembaga Ekonomi Budaya, 2001). h. 21.

²²*Ibid.*, hlm. 123.

Doktrin Islam tentang zakat sebenarnya adalah bimbingan untuk menyikapi harta dan pendistribusiannya secara baik. Salah satu yang diinginkan Islam dengan fungsi harta adalah memberi kesejahteraan sebesar-besarnya secara merata. Islam tidak menginginkan jika harta yang seharusnya menjadi salah satu kesejahteraan hidup bagi semua manusia, terdistribusi hanya kepada sekelompok orang tertentu saja. Itulah sebabnya Islam mendorong kerja keras di satu sisi dan di sisi lain Islam mensyariatkan zakat. Perintah bekerja keras akan membentuk komunitas muzakki atau kelompok masyarakat penunai zakat dan penegakan syariat zakat akan membangun dinamika harmonisme hubungan dengan kelompok masyarakat lain yang disebut dengan mustadh'afin atau kaum fakir-miskin dan sejenisnya.

Islam memandang bahwa kemiskinan adalah hal yang harus disikapi serius agar tidak menggerogoti tubuh sikap keberagaan umat Islam, karena ia dapat menghilangkan keimanan dan menggantinya dengan kekafiran. Dampak negative kemiskinan bukan hanya pada pelemahan akidah yang mengakibatkan kekufuran, tetapi juga berimplikasi pada aspek kemanusiaan. Karena besarnya pengaruh kemiskinan terhadap kemanusiaan, hingga ada yang menilai bahwa terlibat dalam menciptakan kemiskinan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena setiap orang pada dasarnya berhak untuk hidup layak dan sejahtera. Orang yang miskin seringkali kehilangan hak mendapatkan asupan gizi, tidak layak dalam hunian, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.²³ Semua itu, tentulah bentuk pelanggaran HAM dari pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin keterpenuhan hak-hak dasar kemanusiaan tersebut.

Dalam konteks menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai referensi penanganan dan pengentasan kemiskinan, al-Qur'an memerintahkan untuk menolong kaum fakir miskin melalui implementasi pengamalan ajaran zakat. Perintah tersebut tidak hanya ditujukan kepada orang Islam secara individual, melainkan juga secara komunal, baik melalui lembaga atau institusi yang diamanahi tanggung jawab untuk mewujudkan pengelolaan zakat tersebut, dalam bentuk menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakannya.

Oleh karena zakat bukan hanya perintah yang bersifat personal, ajaran zakat tersebut juga tidak bisa dipahami hanya sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual) kepada Allah untuk membina harmonitas hubungan vertikal kepada Allah, akan tetapi lebih dari itu, zakat adalah ibadah mu'amalah ijtimaiyyah (sosial) dalam rangka menjalin harmonitas hubungan horizontal sesama manusia. Itulah sebabnya, zakat tidak boleh ditempatkan pada ranah privat, yang bergantung kepada masing-masing pribadi menyikapinya, tetapi ia adalah ajaran agama yang seharusnya disikapi secara komunal dan sosial yang menuntut keterlibatan institusi yang lebih besar, seperti pemerintah untuk mendorong maksimalisasi pelaksanaan dan pengelolaannya.²⁴

---

²³Munir, *Pesantren dan Strategi*. h. 6.

²⁴Hadis yang menjelaskan bahwa menghimpun zakat adalah kewenangan negara (pemerintah) adalah hadis Mu'az bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman: *diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Nabi Saw berkata kepada Mu'az ketika diutus ke Yaman, "...apabila mereka patuh kepadamu untuk (berikrar dua kalimat syhadat) maka beitahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta benda mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka".* Lihat Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, cet, 2 (Mesir: al-Sya'bi, t.t.). h. 120.

Penanganan zakat oleh pemerintah dengan pola kordinasi kelembagaan yang memiliki system manajemen yang fungsional dan professional menjadi sangat dibutuhkan, karena zakat sebagai doktrin agama yang harus ditunaikan punya relevansi dengan upaya pemerintah untuk mengupayakan penanganan dan pengentasan kemiskinan.²⁵

Mengninat pentingnya peran pemerintah dalam mendorong terwujud-nya system pengelolaan zakat yang integrative dan komprehensif, maka regulasi atau payung hukum pengelolaan zakat tersebut harus diperkuat, demikian juga sinergitas kelembagaan yang ada kaitan dengan system kerja pengelolaan zakat, selanjutnya system pengawasan pengelolaannya yang akuntabel dan berdaya guna bagi pemenuhan kebutuhan hidup fakir miskin. Regulasi dan sinergi kelembagaan bisa dilakukan dengan cara membagi peran dan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah akan mengawal pelaksanaan regulasi zakat tersebut sambil membantu sosialisasi dan realisasi pengelolaannya pada semua tingkatan, dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, melalui pelibatan unsur pemerintahan pada berbagai tingkatan tersebut.

Manakala terjadi hambatan dalam system pengelolaan zakat dari masyarakat tersebut semisal ada masalah pada pengumpulan zakat karena orang yang sudah memenuhi haul dan nishab harta menolak untuk menunaikan zakatnya, maka seharusnya pemerintah dapat mendorong penguatan pemungutan zakat tersebut dengan menetapkan sanksi pidana dan sejenisnya terhadap sikap mereka yang membangkang membayar zakat. Bahkan penulis kitab Tafsir al-Qurtubi²⁶ ketika menafsirkan QS. al-Taubah (9): 60 menyatakan bahwa lafadz al-'amilina 'alayha (para amil), mereka adalah orang-orang yang diamanahi oleh pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung, mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki dan untuk kemudian mendayagunakannya kepada yang berhak menerimanya. Hal itu menunjukkan, bahwa zakat bukanlah kewajiban dan tanggung jawab perseorangan, melainkan tugas kenegaraan. Olehnya itu, pemerintah harus mengurus, mengawal, dan mengangkat para amil yang bertugas mengelola zakat.

Zakat dikelola pemerintah dengan membuat regulasi, yang dengan regulasi tersebut dibentuklah lembaga secara khusus yang mengelola zakat mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan kota.²⁷ Regulasi perundangan mengamankan pengelolaan zakat kepada lembaga tertentu yang diberi nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi zakat tersebut lahir dari aspirasi kaum muslimin yang direspon oleh DPR dan pemerintah. Sebelumnya zakat telah diatur melalui UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lalu diperbaharui dengan UU No 23 tersebut. Ruh kedua undang-undang tersebut sama, yaitu mendorong terwujudnya pengelolaan zakat secara maksimal dan berdaya guna, terutama dalam memfasilitasi kaum muslimin untuk mendapatkan kemudahan dalam menunaikan zakat dan memberi perhatian kepada kaum mustadh'afin agar kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi melalui pendistribusian dan pendaya gunaan zakat.

---

²⁵Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'al ajaha al-Islam*, cet. 2 (Mesir: Maktabah al-Wahbah, 1975). h. 85.

²⁶Al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam l-Qur'an* (Libanon: Dar al-Kutub 'Imiyah, 1993), IV: 112-113.

²⁷Sjechul Hadi Pormono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992). h. 154.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah melalui lembaga yang dibentuk, fungsi zakat sebagai salah satu upaya menangani kemiskinan dapat dimaksimalkan. Selain itu fungsi strategis zakat juga ada pada system ekonomi, karena zakat merupakan sarana yang efektif dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan institusi ekonomi konvensional dan kegiatan prekonomian yang telah ada dewasa ini.

Menjadikan zakat sebagai salah satu sarana penanggulan dan pengentasan kemiskinan, memiliki kekhusuan antara lain; 1) Pengalokasian dananya sudah ditentukan secara jelas kepada delapan golongan saja (asnaf) yaitu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad d jalan agama dan anak jalanan (ibnu al-sabil).²⁸ Hal tersebut menunjukkan potensi penyaluran akan tepat sasaran, apalagi dalam fiqhi Islam peruntukan zakat kepada selain delapan asnaf tersebut, tidak dibenarkan oleh kesepakatan ulama. Pembatasan peruntukan itu membuat zakat secara interen sangat berpihak kepada kaum fakir dan miskin (pro poor), tidak ada satu pun instrument fiscal konvensional memiliki karakteristik unik seperti ini. 2) Zakat memiliki jumlah yang definitive karena sudah diatur dalam syari'at, sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang sangat luas seperti zakat mal kadanya hanya 2,5%. Begitu juga kadar zakat terhadap harta lainnya ada yang 5% dan ada yang 10 %. Karena itu penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan jaminan atas kepastian usaha. 3) Zakat dihimpun dari sumber-sumber penghasilan yang luas meliputi berbagai aspek ekonomi produktif, bahkan ahli fiqhi kontemporer memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan atau keahlian bekerja, yang disebut zakat penghasilan. Tentu hal ini menjadi semacam sumber perolehan yang besar yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan program-program pengetasan kemiskinan.

Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa fungsi zakat bukan hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tetapi setidaknya fungsi zakat tersebut dapat dirasakan oleh tiga komponen yang terkait dengan pengelolaan zakat tersebut. Ia menyatakan bahwa tujuan zakat dapat dibagi ke dalam tiga bagian (1) muzakki (pihak wajib zakat, (2) mustahik (pihak penerima zakat), (3) kepentingan masyarakat (sosial).²⁹ Bagi muzakki, tujuannya antara lain, untuk menyucikan diri mereka dari sifat bakhil, rakus, egoistis, melatih jiwa untuk bersikap terpuji, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta dari unsur noda, melatih diri agar menjadi pemurah, seta menumbuh-kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya. Bagi mustahiq, antara lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil, memunculkan rasa simpatik, hormat serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan harta orang-orang kaya yang pemurah. Kemudian tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, antara lain adalah mendorong peningkatan nilai pemerataan ekonomi masyarakat, karena terjadi distribusi pendapatan. Itulah faktor yang dapat mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.³⁰ Dengan demikian, jelas bahwa zakat mempunyai dimensi sosial selain dimensi individual, sehingga apabila tidak ditunaikan akan menimbulkan dampak negative

²⁸Lihat Q.S. At-Taubah: 60

²⁹Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*. h. 108-109.

³⁰Zen, "Kontribusi Zakat". h. 17-18.

berupa kerawanan sosial, seperti banyaknya pengangguran, pencurian, perampokan, penjabretan, dan berbagai penyakit sosial lainnya.³¹

Energi sosial yang dirasakan dalam ajaran zakat, juga dirasakan oleh pemerintah dan DPR saat menggodok Undang-Undang Zakat No 23. Tahun 2011. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat melalui pembentukan amil zakat adalah: 1) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, jelas tertulis dalam undang-undang zakat tentang konsep penanggulan kemiskinan yang menjadi tujuan diundangkannya zakat, selain zakat juga tetap menjadi doktrin dan pengamalan agama bagi umat Islam.

Keterlibatan pemerintah dalam mendorong terwujudnya pengelolaan zakat dengan menunjuk amil zakat yang terpercaya dan profesional berdasarkan amanah undang-undang memang sangat diharapkan, karena beberapa alasan berikut: Pertama; lebih sesuai dengan tuntunan syariah (baik al Quran mau pun as Sunnah) dan sirah nabawiyah serta sirah sahabat. Kedua; untuk menjaga kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat. Ketiga; untuk menjaga perasaan rendah diri orang yang berhak menerima zakat manakala berhadapan langsung dengan muzakki, Keempat; agar bisa terwujud efisiensi, efektifitas dan ketepatan sasaran dalam pengalokasian zakat menurut skala prioritas sesuai kondisi kebutuhan masyarakat. Keempat; untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara. Jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan masing-masing muzakki kepada setiap orang yang berhak menerimanya (mustahik), maka syiar agamanya akan redup dan tidak terasa gaungnya.

Konsekuensi lahirnya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah harus membentuk lembaga yang diberi tanggung jawab mengelola zakat. Dalam undang-undang tersebut yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.³² BAZNAS ini terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan mempunyai integritas. Di lain pihak, masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk ikut melakukan pengelolaan zakat Bersama BAZNAS dengan mendirikan institusi pengelolaan yang disebut Lembaga zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa dan oleh masyarakat sendiri yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).³³

Substansi dan signifikansi keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 adalah mendorong dan memastikan terjadinya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan zakat. Dalam hal pengumpulan dana zakat, undang-undang hanya mengamanahkan untuk menjemput atau menerima zakat kepada BAZNAS, tidak ada sama sekali kewenangan yang bersifat memaksa atau memberi sanksi karena seorang muzakki tidak mau membayar zakatnya. Kewenangan

---

³¹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhalah dan Sosial*, cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 78.

³²Lihat Undang-Undang No. 23. Tahun 2011 tentang Penegelolaan Zakat, BAB II Pasal 5 s/d Pasal 16.

³³Lihat Undang-Undang No. 23. Tahun 2011 tentang Penegelolaan Zakat, BAB II Pasal 17 s/d Pasal 20.

menghitung kadar harta yang wajib dikeluarkan zakat pun diserahkan kepada muzakki secara suka rela, nanti jika muzakki tersebut kesulitan dalam hal menghitung harta wajib keluar zakatnya, barulah ia dibantu oleh amil zakat. Ini menunjukkan bahwa kerja keras amil dalam hal ini BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat adalah membangun kesadaran tentang pentingnya menunaikan zakat dan menyalurkannya melalui BZNAS sebagai lembaga resmi bentukan pemerintah.

Lemahnya sanksi atau tindakan yang ditujukan kepada pihak yang berpotensi mangkir dan enggan membayar zakat, akan berpengaruh pada tingkat kesadaran umat untuk menunaikan perintah zakat tersebut, dan juga akan berpengaruh pada jumlah dana zakat yang akan dikumpulkan oleh BAZNAS, padahal Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya muslim, adalah negara yang terbesar potensi zakatnya, yaitu mencapai 233 Trilyun. Analisa potensi zakat nasional ini berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019. Jumlah potensi zakat tersebut, didasarkan komponen Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). Ada pun sebaran potensi tersebut adalah potensi zakat pertanian sebesar Rp. 19,79 triliun, zakat peternakan sebesar Rp. 9,51 triliun, zakat uang sebesar Rp. 58,76 triliun, zakat perusahaan sebesar Rp. 6,71 triliun, dan zakat penghasilan sebesar Rp. 139,07 triliun. Total potensi zakat Indonesia berdasarkan komponen zakat berjumlah Rp. 233, 8 triliun.³⁴

Keterlibatan pemerintah dalam mendorong terwujudnya pengelolaan dan pengurusan zakat, sangat terasa dalam hal-hal berikut: (i) support pembentukan Amil zakat; (ii) perlindungan hukum yang diberikannya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ); (iii) mendorong profesionalitas dalam bentuk pelaporan dan pertanggung jawaban secara berkala pengelolaan zakat oleh BAZNAS dan LAZ. (iv) mengamankan sinergitas unsur pemerintah mulai dari Presiden, Gubernur, hingga Bupati dan Walikota dalam perwujudannya pengelolaan zakat; dan (v) menyiapkan APBN dan APBD untuk membantu biaya pengelolaan zakat.³⁵

Keterlibatan pemerintah dalam pengaturan dan pengelolaan zakat seperti yang terlihat di atas mengindikasikan telah terjadinya peningkatan keterlibatan negara dalam pelaksanaan zakat di Indonesia. Meskipun ketika lahir undang-undang tersebut banyak pula pihak-pihak yang masih berkeberatan dengan keterlibatan pemerintah dalam pengurusan ajaran agama seperti zakat. Lagi-lagi argument yang sering dimunculkan adalah Indonesia bukan negara Islam.

Jika melihat potensi zakat yang mencapai ratusan trilyun, sesungguhnya itu adalah potensi dana umat yang sangat luar biasa. Disayangkan, hasil penelitian dari LSM PIRAC sekitar tahun 2001-2001, potensi dana zakat yang besar itu, hanya mampu diserap oleh masyarakat sekitar 53% dari total potensi yang ada dan ironisnya hanya 3,3% yang mampu dikumpulkan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Hal ini menunjukkan realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang ada. Bahkan, hingga 2009 baru Rp. 1,2 triliun yang berhasil dihimpun oleh Lembaga-lembaga pengelola zakat.³⁶ Hal ini menunjukkan realisasi pengumpulan zakat masih jauh dari potensi yang ada.

³⁴ Muhammad Hasbi Zainal, dkk. Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), (Jakarta; Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS), 2019). h. 140.

³⁵ A. A. Miftah, *Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qada'I dalam Negara Indonesia*. (Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2005). h. 7.

³⁶ Didin Hafiuddin, *Makalah Dalam Word Zakat Forum*, Yogyakarta, 29-2 Oktober 2010. h. 4.

4. Penutup

Ajaran Islam sebagai ajaran yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, seharusnya dirujuk untuk menjadi solusi atas beberapa persoalan sosial kemasyarakatan, seperti upaya pengentasan kemiskinan. Zakat sebagai doktrin agama, tidak yang bersifat ilzami ijbari tidak bias hanya dipahami dalam paradigma ibadah fardhiyyah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah semata, tetapi ia juga merupakan ibadah mu'amalah ijtima'iyyah yang memiliki dimensi ekonomi, sosial dan politik. Terbitnya Undang-Undang No 23 Tahun 2011, sebagai pengganti UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, adalah hal positif bagi terwujudnya sistem pengelolaan zakat nasional yang dapat menjadi acuan dalam melakukan pengentasan kemiskinan.

Referensi

- A. A. Miftah, *Zakat Sebagai Hukum Diyani dan Qada'I dalam Negara Indonesia*. Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, cet. 2. Mesir: al-Sya'bi, t.t.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *Mu'jam al-Mufahras li al-faz al-Qur'an* (http://tnp., t.t.).
- Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. 3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Isfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufrada Alfaz al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qurtubi, *al-Jami li Ahkam l-Qur'an*. Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1993.
- Anjaeni, Rahma. "Enam Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Versi BPS", [kontan.co.id](https://nasional.kontan.co.id/news/enam--yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps). 06 Februari 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/enam--yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps>. (15 Maret 2020)
- "Presentase Penduduk Miskin September 2019 Turun Menjadi 9,22 Persen", *Situs Resmi Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html>. (1 April 2019).
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 7. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Arraiyyah, Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Didin Hafiuddin, Makalah Dalam Word Zakat Forum, Yogyakarta, 29-2 Oktober 2010.
- Galbraith, John Kenneth. *Hakekat Kemiskinan Massa*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983.
- Hafiuddi, Didin. "Tiang Utama Ekonomi Syar'ah", Makalah Dipresentasikan pada Seminar Bulanan MES, Bank Mandiri Tower, 20 November 2006.
- Hafsan, Muhammad Ja'far. "Zakat sebagai Tiang Utama Ekonomi Syari'ah, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat". Bandung: Iris Press, 2008.
- Isdijoso, Widjajanti. *Kertas Kerja Semeru, Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*. Jakarta: The SMERU Research Institut, 2016.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasit*. Teheran; Makatabah al-Ilmiyah, t.t.

- Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Muhammad Hasbi Zainal, dkk. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ)*, (Jakarta; Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS), 2019.
- Pormono, Sjechul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h. 78.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqh al-zakah*, Cet. 2. Beirut: Muassasat ar-Rsyar'I karena Allahisalah, 1973.
- Qardawi, Yusuf. *Hudari hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk., cet. 11. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'al ajaha al-Islam*, cet. 2. Mesir: Maktabah al-Wahbah, 1975.
- Raharjo, M. Dawam. *Esei-Esei Ekonom Politik*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Soetrisno, *Memberdayakan Masyarakat Pedesaan*. Sidoarjo: Lembaga Ekonomi Budaya, 2001.
- Undang-Undang No. 23. Tahun 2011 tentang Penegelolaan Zakat, BAB II Pasal 5 s/d Pasal 16.
- Undang-Undang No. 23. Tahun 2011 tentang Penegelolaan Zakat, BAB II Pasal 17 s/d Pasal 20.
- Wawancara dengan Muhammad Yunus dalam Al-Washathiyyah, Vol. III, No14, 2008.
- Yunus, Muhammad. *Bank Kaum Miskiin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskiinan*, terj. Irfan Maulana. ttp.: tnp., 2007.
- Zen, Fuad. "Kontribusi Zakat bagi Kesejahteraan Masyarakat dan Permasalahannya: Sebuah Tilikan Normatif dan Empirik" dalam *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara lain Idealitas dan Realitas*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ahUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.